

Proyek Penataan Alun-alun Gunungkencana Disorot

LEBAK (IM)- Proyek penataan Alun-alun Gunungkencana yang dilaksanakan CV Visnu Wahana Teknitema mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Gunungkencana (Himaguna). Apalagi, pagar yang dibangun ambruk karena diduga besi yang digunakan cukup minim.

Ketua Himaguna, Angga membenarkan, pagar yang dibangun perusahaan ambruk beberapa hari lalu. Dugaannya, pagar tersebut minim dalam penggunaan besi. Karena itu, pihak pelaksana proyek langsung melakukan perbaikan.

"Sekarang udah dirapikan lagi dan pekerjaan pembangunan dilanjutkan," kata Angga, Kamis (25/11).

Angga juga menyoroti keterbukaan pelaksana proyek dalam persoalan anggaran penataan Alun-alun Gunungkencana. Dalam plang proyek anggarannya hanya Rp 773.894 dan pekerjaan akan dilaksanakan selama 90 hari.

"Agak aneh dan tidak masuk akal ini anggaran penataan Alun-alun Gunungkencana," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Camat Gunungkencana, Firman Arif Hidayat membenarkan pagar di Alun-alun Gunungkencana ambruk. Namun, dia tidak menjelaskan penyebab pagar yang sedang dibangun tersebut roboh. "Iya ambruk, tapi sekarang sudah dirapikan lagi oleh pelaksana proyeknya," ungkap Firman. ● pp

Posko Pengawasan PPKM Level 3 akan Diaktifkan Kembali

TANGERANG (IM)- Pemkab Tangerang akan kembali mengaktifkan sejumlah posko pengawasan penerapan prokes di sejumlah titik saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga selama libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Hal tersebut diungkapkan, Juru Bicara Penanganan dan Penanggulangan Covid-19, dr Hendra Tarmizi saat ditemui di sela-sela acara vaksinasi.

Pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri berupaya melakukan persiapan dengan berkoordinasi bersama stakeholder terkait.

"Dalam persiapan menghadap Nataru nanti, kita sudah siapkan sarana dan prasarana seperti menyiapkan tes usap antigen, ruangan isolasi, ruangan perawatan di rumah sakit dan lain sebagainya kita siapkan," katanya.

Kemudian, lanjut dia, selain menyiapkan sarana dan prasarana pendukung juga pihaknya akan memperketat dalam pengawasan di sejumlah fasilitas umum terutama di pusat keramaian menjelang pergantian tahun baru tersebut.

"Nanti dari Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja akan mengawasi penerapan PPKM," ujarnya. ● pp

DUKUNG UMKM JABAR

Kang Emil Ikut Mendesain dan Pasarkan Produk di Medsos

BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil berupaya terus mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Adapun upaya tersebut ia lakukan dengan membantu memasarkan produk UMKM Jabar lewat media sosial (medsos) pribadinya yang memiliki belasan juta pengikut.

"Saya ikut bantu menaikkan UMKM Jabar sebagai marketing. Saya posting produk mereka di Instagram pribadi yang memiliki 14 juta followers," imbuh pria yang akrab disapa Kang Emil itu seperti dalam siaran pers yang diterima, Kamis (25/11).

Tak hanya itu, orang nomor satu se-Jabar ini juga turut mendesain produk UMKM, seperti sepatu, celana jeans, helm, hingga jaket secara gratis.

Selain sebagai marketing, Kang Emil juga memberikan dukungan konkret untuk UMKM dari sisi anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar lewat program One Pesantren One Product (OPOP). "Sudah hampir 2.000 pesantren sekarang memiliki usaha sendiri," ucapnya saat menghadiri acara Tepas Vol 11 di Anjungan Jabar Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Rabu (24/11).

Dalam acara Tepas Vol 11 itu, Kang Emil berkesempatan meresmikan gerai Dekranasda Jabar bernama Kerabat Store. Sebanyak 184 produk UMKM Jabar ikut mangkal di Kerabat Store dan dijual pula secara online. "Semoga produk UMKM Jabar yang ada di Kerabat Store laku keras secara toko maupun digital," ujarnya.

Untuk diketahui, sebanyak 2,6 juta UMKM Jabar sudah terkoneksi digital. Jumlah ini adalah yang terbanyak se-Indonesia. Bahkan, Bank Indonesia pada Rabu (24/11), memberikan penghargaan untuk Jabar sebagai daerah dengan ekonomi digital terbaik. ● pur



IDN/ANTARA

SERBUAN VAKSINASI COVID-19 MENYAMBUT HARI ARMADA

Personel TNI AL menyerahkan bingkisan paket sembako kepada warga saat acara Serbuan Vaksinasi COVID-19 Massal Bersama TNI AL di Balai Pertemuan Warga Kramatwatu, Serang, Banten, Kamis (25/11). Program vaksinasi yang bertujuan menuntaskan pencapaian kekebalan komunal dan Indonesia bebas COVID-19 itu berlangsung dalam menyambut Hari Armada RI.

Permintaan Tinggi, Pemkab Tangerang Ajak Petani Budidaya Porang Secara Mandiri

Selain mudah dalam pembudidayaannya, tanaman porang ini juga dinilai dapat membantu meningkatkan ekonomi para petani karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

TANGERANG (IM)- Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengajak para petani di daerah itu untuk membudidayakan tanaman jenis porang secara mandiri dengan memanfaatkan

lahan yang ada, guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperpan) Kabupaten Tangerang, Azis Gunawan di Tangerang, Kamis (25) mengatakan dalam

pemanfaatan budidaya porang tersebut dapat dilakukan petani di sela-sela tanamannya atau di lahan yang tak terpakai.

"Artinya tanaman porang ini juga dinilai cukup mudah dalam penanamannya jadi tidak cukup merepotkan petani. Jadi bisa di tanam di mana saja," katanya.

Menurut dia, selain mudah dalam pembudidayaannya, tanaman porang ini juga dinilai dapat membantu meningkatkan ekonomi para petani karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Selain itu, lanjutnya, tana-

man jenis umbi-umbian itu bisa diolah menjadi pangan pengganti beras seperti bahan baku tepung, kosmetik, bahan baku penjernih air dan bahan pembuatan untuk lem.

"Tanaman porang juga memiliki peluang pasar yang baik, dan dari hasil survei tim dari entrepreneurship cukup baik untuk meningkatkan ekonomi para petani," ujarnya.

Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini akan terus melakukan sosialisasi kepada petani terkait

pembudidayaan tanaman porang tersebut.

"Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para petani untuk dapat mengembangkan tanaman porang secara mandiri," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mulai melakukan pengembangan tanaman porang di luasan lahan 4.000 meter di kampung Margasari, Desa Kedung Dalam, Kecamatan Mauk sebagai sentra budidaya untuk mendukung komoditas pertanian setempat. ● pp

UMK Tangsel Diminta Naik, Kadisnaker: Tunggu Saja

SERPONG (IM)- Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyampaikan rekomendasi angka kenaikan upah minimum kota (UMK) 2022 Kota Tangsel kepada Gubernur Banten. Wahidin Halim. Penetapan UMK ini masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangsel, Sukanta mengatakan, pihaknya telah

menampung aspirasi soal angka UMK 2022 Kota Tangsel, baik dari serikat pekerja maupun dari pelaku usaha.

Dia menyebut ada kenaikan angka UMK 2022 sebesar 1,17 persen atau sekitar Rp 49 ribu dari tahun sebelumnya. Angka itu disebut tertinggi se-Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

"Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PP

Nomor 36 Tahun 2021, Kota Tangsel ada kenaikan 1,17 persen dari UMK 2021. Jumlahnya sekitar Rp 49 ribu sekian," kata Sukanta.

Dia mengatakan, perhitungan angka berdasarkan PP tersebut diakui mendapat penolakan, baik dari serikat pekerja maupun pelaku usaha. Bagi serikat pekerja, angka tersebut kecil, sementara pelaku usaha menginginkan tidak ada kenaikan atau angka kenaikannya lebih kecil

dari 1,17 persen.

"Serikat buruh meminta kenaikan 10 persen. Apindo menolak kenaikan karena masih pandemi, minimal sama dengan Kabupaten Tangerang, karena kan perusahaan di Tangsel banyak juga karyawannya yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Kalau tidak sama dengan sini akhirnya kan pola penggajiannya bingung," jelasnya.

Sukanta mengungkapkan, sepengamatannya kemungki-

nan besar keputusan tersebut mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Lebih lanjut, Sukanta menyebut pihaknya menunggu keputusan dari Gubernur Banten Wahidin Halim untuk memberi keputusan.

"Tinggal nunggu keputusan gubernur. Batas akhirnya tanggal 30 November Kepgub (Keputusan Gubernur) harus sudah ada," kata dia. ● pp

Lebak Raih Penghargaan dari BI Perwakilan Banten

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meraih peringkat pertama dalam implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Banten Tahun 2021. Penghargaan tersebut diberikan Kepala BI Perwakilan Banten kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Hari Setiono. "Alhamdulillah, tahun ini kita meraih peringkat pertama dalam implementasi ETPD atau transaksi non tunai," kata Hari Setiono, Kamis (25/11).

Dikatakan Hari, Bupati Iri Octavia Jayabaya memiliki komitmen dalam mendorong elektrifikasi transaksi pemerintah daerah. Bahkan, Bupati ingin semua tran-

saksi dilakukan secara non tunai. Hal ini untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. "Transaksi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah sudah dilakukan secara non tunai. Ini jntuk mencegah kebocoran pendapatan di Lebak," ungkapnya.

Bapenda Lebak, kata Hari, terus memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu, evaluasi pelayanan intens dilakukan di internal Bapenda.

"Evaluasi dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaan pajak serta retribusi daerah," jelasnya. ● pra

Lahan Eks BLBI akan Dipakai Bangun Ibu Kota Bogor

JAKARTA (IM)- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa tanah rencananya akan digunakan untuk membuat ibu kota baru untuk Kota Bogor.

Pemerintah melakukan serah terima hibah aset eks BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor (Pemkot) Bogor senilai Rp 345,7 miliar dengan luas 10,3 ha, dan melakukan penanahan status penggunaan aset eks BLBI untuk tujuh kementerian dan lembaga senilai Rp 146,5 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 492 miliar.

"Pak wali kota, Pak Bima, akan membuat ibu kota baru di lokasi sehingga akan membuat keseluruhan Kota Bogor menjadi jauh lebih baik, sebagai langsung merupakan tetangga dari ibu kota," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers penyerahan aset eks-BLBI, Kamis (25/11).

Khusus untuk pemban-

gunan ibu kota baru, Pemkot Bogor harus menyediakan sejumlah dana untuk mendukung proyek pembangunan.

"Tentu Pak wali kota harus menyediakan anggarannya untuk membangun ibu kota tersebut, dan dalam APBD saya harap ini menciptakan kegiatan ekonomi, kegiatan untuk pemulihan, akibat Covid. Jadi langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan perekonomian tidak hanya di Kota Bogor dan sekitarnya," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan lahan hibah nantinya akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya untuk memindahkan pusat pemerintahan. Selama ini, kantor pemerintahan dan dinas-dinas di Kota Bogor tidak terpusat. ● pur



IDN/ANTARA

TUNTUT KENAikan UPah DI BOGOR

Pengunjukrasi dari berbagai aliansi buruh melakukan aksi tutup jalan saat unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/11). Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 sebesar 10 persen dan menolak omnibuslaw.

Kajati Banten Minta Kepala Dinas di Cilegon Laporkan Jika Ada Jaksa Nakal

CILEGON (IM)- Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Reda Manthovani meminta Kepala Dinas di Cilegon berani melapor jika ada jaksa nakal. Pihaknya akan menindaklanjuti jika ada laporan dari pemerintah terkait laporan jaksa nakal itu.

Reda mengatakan pihaknya tak menginginkan ada jaksa yang dilapor karena menyalahi tugasnya sebagai jaksa. Jika terbukti ada jaksa nakal, Reda tak segan-segan akan memindahkan jaksa tersebut.

"Nanti inspektorkan bisa kasih informasi ke kita, saya nggak mau di sini ada jaksa nakal yang bermain," kata Reda saat penandatanganan MoU antara Kejari dan Pemkot Cilegon terkait pencegahan korupsi di Cilegon, Kamis (25/11).

"Misalnya contoh ada jaksa yang macam-macam, laporkan saja," lanjutnya.

Reda mencontohkan ada seorang jaksa di Cilegon yang dilaporkan soal kelakuannya saat menjabat Kasi Intelijen di Kejari Cilegon. Berkat laporan itu, pejabat tersebut dipindah ke Kejari Muara Dua, Sumatera Selatan, beberapa waktu lalu.

"Seperti kasi intel Cilegon dipindah karena menurut informasi di media ada sesuatu," ujarnya.

Selain melaporkan jaksa nakal, Reda mengingatkan para Kepala Dinas agar berhati-hati terkait pelaksanaan kebijakan. Dia mengingatkan jangan sampai tidak tenang saat pensiun nanti.

"Sebisa mungkin diselarskan dengan aturan yang ada sehingga Bapak/Ibu semua lebih tenang, lebih tenang pensiunnya," kata dia.

Sementara, terkait penandatanganan kerja sama pencegahan korupsi di Pemkot Cilegon, lanjut Reda harus dilakukan secara bertahap. Dia mengakui pencegahan korupsi bukan perkara mudah.

"Ini upaya yang berat tau harus dilakukan, peran tapi pasti, yang cepet di Indonesia ini memang agak susah perlu step by step, kalo nggak Pak Wali langsung kejangkel," ujarnya. ● pra

Gunakan Nama dan Foto Pejabat, Penipu Keruk Ratusan Juta Rupiah

TANGSEL (IM)- Polres Tangsel masih memeriksa pria berinisial SPS (25) yang diduga telah melakukan penipuan melalui Whatsapp. Selain telah mencatut nama dan foto Kapolres Tangsel, AKBP Iman Imanudin, pelaku juga diduga menggunakan nama dan foto pejabat daerah hingga kementerian dalam aksinya.

Berlagak seakan-akan sang pejabat, SPS meminta korban-korbannya mentransfer sejumlah uang. Dia bahkan telah mendapatkan uang hingga ratusan juta rupiah dari aksi penipuan itu.

"Pelaku juga mencatut nama pejabat lain atas nama Dandim dan kementerian. Korbannya juga sudah ada beberapa yang membuat laporan," jelas Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Iman Imanudin, Kamis (25/11).

SPS diamankan di wilayah Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Dia mengakui perbuatannya. "Pelaku menggunakan nama dan foto pejabat yang dicatut. Salah satunya dia

pakai foto saya untuk meminta uang ke korban," jelas Iman.

Berdasarkan pengakuan awal pelaku, aksi permintaan uang atas nama pejabat daerah itu dilakukan lebih dari satu kali. Bahkan, korban diminta mentransfer uang ke pelaku hingga ratusan juta rupiah.

"Nominal uang yang diminta ke korban bervariasi, antara Rp4 hingga Rp164 juta. Dia meminta korban uang tersebut ditransfer. Lengkapnya akan kita untkap saat rilis nanti," jelas Iman.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pihak merasa tertipu oleh pihak diduga mengatasnamakan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanudin, yang meminta dikirimkan uang melau transfer bank. Pelaku telah diamankan dan dalam pengembangan polisi.

Seorang warga Pamulang, Kota Tangerang Selatan, T, mengaku menjadi korban penipuan dengan modus transfer kepada orang yang mengaku sebagai Kapolres Tangerang Selatan. Dia diminta mentransfer Rp1 juta. ● pp



IDN/ANTARA

DETEKSI DINI TUBERKULOSIS

Tenaga kesehatan bersiap melakukan rontgen thorax terhadap pasien di RSUD Kota Tangerang, Banten, Kamis (25/11). Pemerintah Kota Tangerang menghadirkan layanan rontgen thorax secara gratis untuk melakukan deteksi dini tuberculosis (TBC) bagi para penyandang diabetes melitus sebagai upaya memenuhi target Kota Tangerang yang bebas dari TBC pada 2030.